



2021

CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

DINPENDUKCAPIL PURBALINGGA

jl. Letjend. S.Parman No.19, Bancar - Purbalingga

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2015, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2015 dan seterusnya, seluruh Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Ada 5 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah:

1.1.1. Maksud :

Sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati Purbalingga.

1.1.2. Tujuan Umum

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1.3. Tujuan Khusus

Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber dana yang dipercayakan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - p. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 - r. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

1.3. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:

1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*) ke Basis Akrual (*Accrual Basis*) pada Laporan Keuangan Tahun 2021.
2. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
 - c. Pembiayaan
3. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos Luar Biasa
4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.

BAB V PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum, pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi belanja pada tahun 2021 yang cukup baik, yaitu realisasi belanja berdasarkan DPA setelah perubahan berada dalam posisi yang cukup baik karena adanya capaian target anggaran sebesar **96,37%**, yaitu dari anggaran **Rp.6.697.266.803,00** terealisasi **Rp.6.453.847.346,00**.

3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

Realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 adalah sebesar Rp.6.453.847.346,00 dari anggaran sebesar Rp.6.697.266.803,00 atau mencapai target 96,37%. Realisasi ini terdiri dari **Belanja Operasi** dari total anggaran sebesar **Rp.6.255.166.803,00** terealisasi sebesar **Rp.6.017.248.346,00** atau mencapai target **96,20%** dan **Belanja Modal** dari total anggaran **Rp.442.100.000,00** terealisasi sebesar **Rp.436.599.000,00** atau mencapai target **98,76%**.

REKAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	Persentase (%)
I	BELANJA OPERASI	6.255.166.803	6.017.248.346	237.918.457	96,20
II	BELANJA MODAL	442.100.000	436.599.000	5.501.000	98,76
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,108,000	15,975,100	132,900	99.17
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,415,465,000	2,361,555,093	53,909,907	97.77
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89,572,000	84,310,000	5,262,000	94.13
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90,179,914	82,769,500	7,410,414	91.78
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240,200,000	234,749,000	5,451,000	97.73
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171,784,000	142,501,184	29,282,816	82.95
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248,617,000	244,925,950	3,691,050	98.52
B	Program Pendaftaran Penduduk				
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	936,833,000	864,953,098	71,879,902	92.33
2	Penataan Pendaftaran Penduduk	944,000,000	943,259,000	741,000	99.92
3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	265,150,000	240,605,000	24,545,000	90.74

C	Program Pencatatan Sipil				
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	604,510,000	583,125,000	21,385,000	96.46
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	107,507,000	98,707,400	8,799,600	91.81
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	155,090,889	145,844,470	9,246,419	94.04
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	340,250,000	339,069,051	1,180,949	99.65
E	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	72,000,000	71,498,500	501,500	99.30

3.1.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020, realisasi anggaran tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja tahun 2021 sebesar Rp.6.453.847.346,00 atau 96,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.6.697.266.803,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.243.419.457,00
- b. Realisasi Belanja tahun 2020 sebesar Rp.7.033.872.567,00 atau 95,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.7.390.812.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.356.939.433,00
- c. Realisasi Belanja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.580.025.221,00 dari realisasi tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan anggaran sebesar Rp. 693.545.197,00 di Tahun 2021 dari Rp.7.390.812.000,00 di tahun 2020 menjadi Rp.6.697.266.803,00 di tahun 2021

3.2 Hambatan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil walaupun target tahun 2021 terpenuhi, namun masih ada beberapa hambatan antara lain:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tertib kepemilikan dokumen kependudukan masih kurang;

2. Perlu sosialisasi yang lebih mendalam dan intens akan pentingnya dokumen kependudukan (akta capil, KK, KTP, KIA, dll) kepada masyarakat, disamping dukungan dana yang memadai;
3. Belum diterapkannya sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasi kependudukan;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berdampak pada biaya operasional diluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tinggi sedang pada pengurusannya sendiri sudah gratis;
5. Komputer maupun printer pelayanan dokumen kependudukan di kecamatan sudah cukup tua sehingga perlu ada pembaharuan untuk kelancaran pelayanan;
6. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan mengalami kendala khususnya dalam pencetakan KTP Elektronik yang terlambat sehingga sempat menjadi keluhan sebagian masyarakat.
7. Kurang adanya Laporan Kependudukan dari masing-masing kecamatan maupun desa sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data jumlah penduduk.
8. Dibutuhkan tenaga keamanan parkir untuk mengatur kendaraan tamu atau pemohon untuk mengantisipasi terjadinya pencurian helm dan kendaraan bermotor.
9. Adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan sebagian besar pelayanan kependudukan di dipendukcapil menggunakan media online, sementara untuk masyarakat/ pemohon belum terbiasa.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 sebesar **Rp.6.453.847.346,00** atau mencapai 96,37% dari anggaran sebesar **Rp.6.697.266.803,00**. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.6.017.248.346,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp.436.599.000,00**.

Realisasi Belanja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.580.025.221,00 dari realisasi tahun 2020.

5.1.1 Pendapatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021 tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja = Rp. 6.453.847.346,00

Realisasi Belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp.6.453.847.346,00 atau mencapai 96,37 % dari anggaran sebesar Rp.6.697.266.803,00. Dibandingkan realisasi tahun 2020, angka tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp.580.025.221,00) atau (8,25%).

Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja).

Berdasarkan jenis, realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp6.017.136.567,00 (96,20%) dari anggaran, dan Belanja Modal sebesar Rp.436.599.000,00 (98,76%) dari anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, mengalami penurunan Belanja Daerah tahun 2021 terjadi pada Belanja Operasi yaitu sebesar Rp.(796.888.221,00) sedangkan untuk Belanja Modal meningkat Rp.216.863.000,00 atau sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
BELANJA	6.697.266.803,00	6.453.847.346,00	7.033.872.567,00	(580,025,221,00)	(8,25)
BELANJA OPERASI	6.255.166.803,00	6.017.248.346,00	6.814.136.567,00	(796,888,221,00)	(11,69)
Belanja Pegawai	2.395.790.000,00	2.342.063.255,00	2.291.374.818,00	50,688,063,00	2,21
Belanja Barang dan Jasa	3.859.376.803,00	3.675.185.091,00	4.522.761.749,00	(847,576,658,00)	(18,74)
BELANJA MODAL	442.100.000,00	436.599.000,00	219.736.000,00	216,863,000,00	98,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442.100.000,00	436.599.000,00	219.736.000,00	216,863,000,00	98,69
JUMLAH	6.697.266.803,00	6.453.847.346,00	7.033.872.567,00	(580,025,221,00)	(8,25)

Belanja Pemerintah Daerah Menurut Kelompok Belanja

Realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran (SAP) tahun anggaran 2021 dikelompokkan menjadi 2 belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal:

1. Belanja Operasi = Rp6.017.248.567,00

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.6.017.248.567,00 atau 96,20% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp.6.255.166.803,00. Realisasi belanja operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.017.248.567,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.796.888.221,00) atau (11,69%) dari realisasi belanja operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.6.814.136.567,00 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
BELANJA OPERASI	6.255.166.803,00	6.017.284.346,00	6.814.136.567,00	(796.888.221,00)	(11,69)
- Belanja Pegawai	2.395.790.000,00	2.342.063.255,00	2.291.374.818,00	50.688.063,00	2,21
- Belanja Barang dan Jasa	3.859.376.803,00	3.675.185.091,00	4.522.761.749,00	(847.576.658,00)	(18,74)

a. Belanja Pegawai = Rp2.342.063.255,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.342.063.255,00 atau 97,76% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp.2.395.790.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.342.063.255,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.50.688.437,00 atau 2,21% dari realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.291.374.818,00, seperti terlihat dalam table di bawah ini:

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
Belanja Pegawai	2.395.790.000,00	2.342.063.255,00	2.291.374.818,00	50.688.437,00	2,21
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.521.390.000,00	1.480.490.255,00	1.607.914.193,00	(127.423.938,00)	(7,92)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	786.800.000,00	774.573.000,00	640.710.625,00	133.862.375,00	20,89
Tambahan Penghasilan	87.600.000,00	87.000.000,00	42.750.000,00	44.250.000,00	103,51

berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
---	--	--	--	--	--

b. Belanja Barang dan Jasa = Rp3.675.185.091,00

Realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.3.675.185.091,00 atau 95,23% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp.3.859.376.803,00. Realisasi Belanja Barang/Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.675.185.091,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.847.576.658,00) atau (18,74%) dari realisasi per 31 Desember 2020 sebesar 4.522.761.749,00 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
BELANJA BARANG DAN JASA	3.859.376.803,00	3.675.185.091,00	4.522.761.749,00	(847,576,658.00)	(18.74)
Belanja Barang	1.654.112.814,00	1.625.937.150,00	2.687.832.500,00	(1,061,895,350.00)	(39.51)
Belanja Jasa	1.556.418.889,00	1.422.354.304,00	1.355.552.804,00	66,801,500.00	4.93
Belanja Pemeliharaan	269.527.000,00	265.822.050,00	83.426.600,00	182,395,450.00	218.63
Belanja Perjalanan Dinas	379.318.100,00	361.071.578,00	395.949.845,00	(34,878,258.00)	(8.81)

2. Belanja Modal = Rp. 436.599.000,00

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.436.599.000,00 atau 98,76% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2021 sebesar Rp.442.100.000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp.436.599.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.216.863.000,00 atau (98,69%) dari realisasi belanja modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp.219.736.000,00, seperti terlihat dalam table di bawah ini:

URAIAN BELANJA MODAL	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
BELANJA MODAL	442.100.000,00	436.599.000,00	219.736.000,00	216.863.000,00	98,69
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	442.100.000,00	436.599.000,00	219.736.000,00	216.863.000,00	98,69
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantoran dan Rumah Tangga	5.150.000,00	5.510.000,00	87.714.000,00	(82.564.000,00)	(94,13)
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Komunikasi, dan Pemancar	2.500.000,00	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	-
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	434.450.000,00	429.350.000,00	132.022.000,00	297.328.000,00	225,21

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Secara ringkas, posisi Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Aset Lancar	6.056.250,00	517.571.613,00	(511.515.363,00)	(98,83)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Aset Tetap	9.258.493.925,87	9.365.452.779,75	(106.958.853,88)	(1,14)
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET	9.264.550.175,87	9.883.024.392,75	(618.474.216,88)	(6,26)
Kewajiban Jangka Pendek	43.487.000,00	55.948.801,00	(12.461.801,00)	(22,27)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	43.487.000,00	55.948.801,00	(12.461.801,00)	(22,27)
Ekuitas	9.221.063.175,87	9.827.075.591,75	(606.012.415,88)	(6,17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.264.550.175,87	9.883.024.392,75	(618.474.216,88)	(6,26)

5.2.1 ASET = Rp.9.264.550.175,87

Posisi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.9.264.550.175,87 dan mengalami penurunan sebesar Rp.618.474.216,88 atau (6,26%) dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.883.024.392,75

Nilai Aset tersebut terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan / Penurunan	
			Rp.	%
Aset Lancar	6.056.250,00	517.571.613,00	(511.515.363,00)	(98,83)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Aset Tetap	9.258.493.925,87	9.365.452.779,75	(106.958.853,88)	(1,14)
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset	9.264.550.175,87	9.883.024.392,75	(618.474.216,88)	(6,26)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa aset di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 secara total mengalami penurunan.

1) Aset Lancar = Rp. 6.056.250,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.056.250,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.511.515.363,00) atau (98,83%) dari Tahun 2020 sebesar Rp.517.571.613,00. Rincian Aset lancar Dinpendukcapil 2021 berasal dari Pos Persediaan seperti dalam tabel berikut:

URAIAN	31 DES 2021	31 DES 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
			Rp.	%
Persediaan	6.056.250,00	517.571.613,00	(511.571.613,00)	(98,83)
Persediaan Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	471.301.000,00	(468.301.000,00)	(99,36)
Persediaan Barang Cetak	1.956.250,00	46.270.613,00	(44.314.363,00)	(95,77)
Persediaan Barang Kertas dan Cover	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-
Jumlah Aset Lancar	6.056.250,00	517.571.613,00	(511.571.613,00)	(98,83)

Berkurangnya aset lancar dikarenakan berkurangnya persediaan alat kantor dll sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas.

2) **Aset Tetap = Rp.9.258.493.925,87**

Nilai Aset tetap Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2021 sebesar Rp.9.258.493.925,87 mengalami penurunan sebesar (Rp.106.958.853,88) atau (1,14%) dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.365.452.799,75.

Posisi aset tetap pada Tahun 2021 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

URAIAN	31 DES 2021	31 DES 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
			Rp.	%
Tanah	1.480.857.000,00	1.480.857.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.301.786.145,00	4.900.852.145,00	400.934.000,00	8,18
Gedung dan Bangunan	7.808.113.500,00	7.808.113.500,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan jaringan	43.521.455,00	43.521.455,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.375.784.174,13)	(4.867.891.320,25)	(507.892.853,88)	(10,43)
Jumlah Aset Tetap	9.258.493.925,87	9.365.452.779,75	(106.958.853,88)	(1,14)

Mutasi Bersih Aset Tetap 2021

URAIAN	Bertambah	Berkurang	Kenaikan/Penurunan
			Rp.
Aset tetap Peralatan dan Mesin	400.934.000,00	-	400.934.000,00
Akumulasi Penyusutan	-	(507.892.853,88)	(507.892.853,88)
Jumlah	400.934.000,00	(507.892.853,88)	(106.958.853,88)

$$\text{Mutasi bersih aset tetap 2021} = 400.934.000,00 - 507.892.853,888 \\ = \mathbf{(106.958.853,88)}$$

Secara rinci, penjelasan atas mutasi tambah dan kurang aset tetap tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Tanah = Rp.1.480.857.000,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.480.857.000,00 tidak ada perubahan, sama dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.480.857.000,00.

URAIAN	31 DES 2021	31 DES 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
			Rp.	%
Tanah	1.480.857.000,00	1.480.857.000,00	0,00	0,00

b. Peralatan dan Mesin = Rp.5.301.786.145,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 **Rp.5.301.786.145,00** bertambah Rp.400.394.000,00 atau 8,18% dari posisi per 31 Desember 2020 **400.394.000,00**.

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Alat-alat angkutan	1.625.954.440,00	1.625.954.440,00	0,00	0,00
Alat-alat bengkel dan alat ukur	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00
Alat kantor& rumah tangga	1.446.476.955,00	1.475.441.955,00	(28.965.000,00)	(1,96)
Alat studio komunikasi dan pemancar	199.173.450,00	197.074.450,00	2.099.000,00	1,07
Alat-alat laboratorium	191.148.800,00	191.148.800,00	0,00	0,00
Alat computer	1.815.132.500,00	1.387.332.500,00	427.800.000,00	30,84
Jumlah	5.301.786.145,00	4.900.852.145,00	400.394.000,00	8,18

Mutasi Bersih Aset Tetap peralatan dan mesin tahun 2021

URAIAN	Bertambah	Berkurang	Kenaikan/Penurunan
			Rp.
Belanja Modal	436.599.000,00	-	436.599.000,00
Kesalahan Pencatatan	-	(35.665.000,00)	(35.665.000,00)
Jumlah	436.599.000,00	(35.665.000,00)	400.934.000,00

$$\begin{aligned} \text{Mutasi bersih aset tetap 2021} &= 436.599.000,00 - 35.665.000,00 \\ &= \mathbf{400.934.000,00} \end{aligned}$$

Untuk Mutasi aset tetap tahun 2021 lebih jelas dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

URAIAN	31 Des 2020			31 Des 2021
		Penambahan	Pengurangan	
Alat-alat angkutan	1.625.954.440,00	0,00	0,00	1.625.954.440,00
Alat-alat bengkel dan alat ukur	23.900.000,00	0,00	0,00	23.900.000,00
Alat kantor& rumah tangga	1.475.441.955,00	700.000,00	29.665.000,00	1.446.476.955,00
Alat studio komunikasi dan pemancar	197.074.450,00	2.099.000,00	0,00	199.173.450,00
Alat-alat laboratorium	191.148.800,00	0,00	0,00	191.148.800,00
Alat computer	1.387.332.500,00	433.800.000,00	6.000.000,00	1.815.132.500,00
Jumlah	4.900.852.145,00	436.599.000,00	35.665.000,00	5.301.786.145,00

Mutasi aset Tahun 2021 pada aset peralatan dan mesin terjadi karena adanya belanja modal tahun 2021 dan kesalahan pencatatan, secara rinci sebagai berikut:

- **Alat-alat Angkutan = Rp 1.625.954.440,00**

Jumlah aset tetap alat-alat angkutan per 31 Desember 2021 adalah Rp. 1.625.954.440,00 tidak ada perubahan atau sama dengan per 31 Desember 2020 Rp. 1.625.954.440,00.

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Alat-alat angkutan	1.625.954.440,00	1.625.954.440,00	0,00	0,00

- **Alat-alat Bengkel dan alat ukur = Rp. 23.900.000,00**

Jumlah aset tetap alat-alat bengkel per 31 Desember 2021 adalah Rp.23.900.000,00 tidak ada perubahan atau sama dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.23.900.000,00.

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Alat-alat bengkel	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	0,00

- **Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga = Rp 1.446.476.955,00**

Jumlah aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2021 adalah Rp.1.446.476.955,00 berkurang (Rp.28.965.000,00) atau (1,96%) dari posisi per 31 Desember 2020 Rp.1.475.441.955,00.

URAIAN	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
Alat kantor & rumah tangga	1.475.441.955,00	700.000,00	29.665.000,00	1.446.476.955,00	(28.965.000,00)	(1,96)

Pada tahun 2021 ada belanja modal aset tetap alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.700.0000,00, dan ada kesalahan pencatatan aset yang menyebabkan berkurangnya aset sebesar Rp.29.665.000,00. Sehingga untuk keseluruhan aset tetap alat kantor dan rumah tangga tahun 2021 berkurang sebesar (Rp.28.965.000,00).

- **Alat Studio Komunikasi dan Pemancar = Rp.199.173.450,00**

Jumlah aset tetap alat studio komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.199.173.450,00, bertambah sebesar Rp.2.099.000,00 atau 1,07% dari posisi 31 Desember 2020 Rp.197.074.450,00

URAIAN	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
Alat studio dan komunikasi	197.074.450,00	2.099.000,00	0,00	199.173.450,00	2.099.000,00	1,07

Pada tahun 2021 ada belanja modal aset tetap alat studio komunikasi dan pemancar sebesar Rp.2.099.000,00 dan tidak ada mutasi lainnya. Sehingga untuk aset tetap alat-alat studio dan komunikasi tahun 2021 bertambah Rp.2.099.000,00.

- Alat-alat Laboratorium = Rp.191.148.800,00

Jumlah aset tetap alat-alat laboratorium per 31 Desember 2021 adalah Rp.191.148.000,00 tidak ada perubahan atau sama dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.191.148.000,00.

Uraian	31 Des 2021	31 Des 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Alat-alat laboratorium	191.148.800,00	191.148.800,00	0,00	0,00

- Alat Komputer = Rp1.815.132.500,00

Jumlah aset tetap alat computer per 31 Desember 2021 adalah **Rp1.815.132.500,00** bertambah Rp.427.800.000,00 atau 30,84% dari posisi per 31 Desember 2020 Rp.1.475.441.955,00.

URAIAN	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	
Alat Komputer	1.387.332.500,00	433.800.000,00	6.000.000,00	1.815.132.500,00	427.800.000,00	30,84

Pada tahun 2021 ada belanja modal aset tetap alat komputer sebesar Rp.433.800.000,00 dan ada kesalahan pencatatan aset yang menyebabkan berkurangnya aset sebesar (Rp.6.000.000,00). Sehingga untuk keseluruhan aset tetap alat computer tahun 2021 bertambah sebesar Rp.427.800.000,00.

c. Gedung dan Bangunan = Rp.7.808.113.500,00

Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 Rp.7.808.113.500,00 tidak ada perubahan atau sama dengan per 31 Desember 2020 Rp.7.808.113.500,00.

URAIAN	31 DES 2021	31 DES 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	
			Rp.	%
Gedung dan Bangunan	7.808.113.500,00	7.808.113.500,00	0,00	0,00

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan = Rp.43.521.455,00

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah Rp.43.521.455,00 tidak ada perubahan atau sama dengan per 31 Desember 2020Rp.43.521.455,00.

e. Aset Tetap Lainnya = Rp. 0,00

Jumlah Aset tetap lainnya Per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan, nilainya Rp.0,00.

f. Akumulasi Penyusutan = Rp.(5.375.784.174,13)

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(5.375.784.174,13) atau bertambah sebesar (Rp.507.892.853,88) atau (10,43%) dari Posisi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp.4.867.891.320,25).

Akumulasi Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp.	%
Alat-alat angkutan darat bermotor	1,486,213,190.00	1.403.531.252,50	82,681,937.50	5.89
Alat Ukur	18,740,000.00	16.160.000,00	2,580,000.00	15.97
Alat Kantor	587,551,000.00	555.001.000,00	32,550,000.00	5.86
Alat Rumah Tangga	596,150,155.00	572.769.245,00	23,380,910.00	4.08
Meja & Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	144,746,000.00	136.746.000,00	8,000,000.00	5.85
Alat Studio	163,741,450.00	147.539.450,00	16,202,000.00	10.98
Alat Komunikasi	2,369,600.00	1.779.900,00	589,700.00	33.13
Unit-unit Laboratorium	186,242,550.00	185.873.800,00	368,750.00	0.20
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	1,040,000.00	960.000,00	80,000.00	8.33
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00
Komputer Unit	341,972,750.00	288.543.000,00	53,429,750.00	18.52
Peralatan Komputer	940,916,000.00	810.136.500,00	130,779,500.00	16.14
Bangunan Gedung Tempat Kerja	824,616,470.00	683.388.620,00	141,227,850.00	20.67
Sarana Pelengkap	74,672,100.00	59.737.680,00	14,934,420.00	25.00
Jaringan Listrik	4,212,909.13	3.124.872,75	1,088,036.38	34.82
JUMLAH	5,375,784,174.13	4.867.891.320,25	507,892,853.88	10.43

3) Aset Lainnya = Rp. 0,00

Tidak ada aset lainnya untuk tahun 2021.

5.2.2 Kewajiban = Rp.43.487.000,00

Jumlah Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021Rp.43.487.000,00, berkurang Rp.12.461.801,00 atau 22,27% dari posisi per 31 Desember 2020Rp.55.948.801,00

Uraian	31 DES2021	31 DES2020	Kenaikan / Penurunan	
			Rp.	%
Kewajiban Jangka Pendek	43.487.000,00	55.948.801,00	(12.461.801,00)	(22,27)

Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	43.487.000,00	55.948.801,00	(12.461.801,00)	(22,27)

Kewajiban jangka pendek Dinpendukcapil per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 43.487.000,00 merupakan utang belanja pegawai berupa Tamsil Bulan Desember 2021.

5.2.3 Ekuitas = Rp.9.221.063.175,87

Posisi ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021 Rp.9.221.063.175,87 atau berkurang (Rp.606.012.415,88) atau (6,17%) dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.827.075.591,75 seperti pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Ekuitas	9.221.063.175,87	9.827.075.591,75	(606.012.415,88)	(6,17)
Jumlah Ekuitas	9.221.063.175,87	9.827.075.591,75	(606.012.415,88)	(6,17)

$$\begin{aligned}
 \text{Ekuitas} &= \text{Jumlah Aset} - \text{Jumlah Kewajiban} \\
 &= 9.264.550.175,87 - 43.487.000,00 \\
 &= \mathbf{9.221.063.175,87}
 \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah Ekuitas 2021} = \mathbf{Rp. 9.221.063.175,87}$$

5.2.4 Kewajiban dan Ekuitas Dana = Rp.9.264.550.175,87

Kewajiban dan Ekuitas Dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2021 Rp.9.264.550.175,87 atau berkurang (Rp.618.474.216,88) atau (6,26%) dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.883.024.392,75 seperti pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Kewajiban & Ekuitas Dana	9.264.550.175,87	9.883.024.392,75	(618.474.216,88)	(6,26)
Jumlah	9.264.550.175,87	9.883.024.392,75	(618.474.216,88)	(6,26)

$$\begin{aligned}
 \text{Kewajiban dan Ekuitas Dana} & \text{ adalah Jumlah Kewajiban ditambah Ekuitas} \\
 &= \mathbf{43.487.000,00 + 9.221.063.175,87} \\
 &= \mathbf{9.264.550.175,87}
 \end{aligned}$$

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam

satu periode pelaporan. Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrua.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, Beban dan Kegiatan Non Operasional.

5.3.1 Pendapatan Laporan Operasional (LO) = Rp. 0,00

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. **Beban** adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 adalah Rp.0,00.

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Pendapatan-LO	0,00	1.899.000,00	(1.899.000,00)	-
Jumlah	0,00	1.899.000,00	(1.899.000,00)	-

5.3.2 Beban = Rp.7.059.859.761,88

Realisasi Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar **Rp.7.059.859.761,88**, atau berkurang sebesar (Rp.512.514.261,99) atau (6,671%) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.7.572.374.023,87 seperti diuraikan pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
			Rp.	%
Beban Pegawai	2.329.601.454,00	2.295.597.994,00	34.003.460,00	1,48
Beban Barang dan Jasa	4.186.700.454,00	4.642.375.626,00	(455.675.172,00)	(9,82)
Beban Peralatan dan Mesin	386.307.547,50	477.150.097,50	(90.842.550,00)	(19,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	156.162.270,00	156.162.270,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.088.036,38	1.088.036,37	0,01	0,00
Jumlah	7.059.859.761,88	7.572.374.023,87	(512.514.261,99)	(6,77)

Laporan Operasional Beban tahun 2021 secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a) **Beban Pegawai = Rp. 2.329.601.454,00**

Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.329.601.454,00 atau bertambah Rp.34.003.460,00 atau 1,48% dari posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.295.597.994,00 secara rincinya terdiri dari:

Uraian	2021	2020	Naik / Turun	
			Rp.	%
Beban Gaji Pokok ASN	1.098.599.000,00	1.205.528.200,00	(106.929.200,00)	(8.87)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	100.982.752,00	113.027.340,00	(12.044.588,00)	(10.66)

Beban Tunjangan Jabatan ASN	105.070.000,00	122,330,000.00	(17,260,000.00)	(14.11)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.210.000,00	28,025,000.00	185,000.00	0.66
Beban Tunjangan Beras ASN	55.184.040,00	53,301,120.00	1,882,920.00	-53
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.478.596,00	8,825,175.00	(346,579.00)	(3.93)
Beban Pembulatan Gaji ASN	13.996,00	17,539.00	3,543.00)	(20.20)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	68.919.153,00	72,956,741.00	(4,037,588.00)	(5.53)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.255.341,00	2,478,564.00	(223,223.00)	(9.01)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.766.076,00	7,435,815.00	(669,739.00)	(9.01)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	604.124.500,00	638,922,500.00	(34,798,000.00)	(5.45)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	163.998.000,00	0,00	163,998,000.00	-
Beban Honorarium	81.600.000,00	42,750,000.00	38,850,000.00	90.88
Beban Jasa Pengelolaan BMD	5.400.000,00	0,00	5,400,000.00	-
JUMLAH	2.329.601.454,00	2.295.597.994,00	34.003.460,00	1,48

Realisasi beban pegawai LO tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.398.034.494,00 sedangkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp.2.342.063.255,00 secara rinci terdiri dari:

URAIAN	REALISASI	PENYESUAIAN	LO
Belanja Gaji Pokok ASN	1.098.599.000,00	0,00	1.098.599.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	100.982.752,00	0,00	100.982.752,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.070.000,00	0,00	105.070.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.210.000,00	0,00	28.210.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	55.184.040,00	0,00	55.184.040,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.478.596,00	0,00	8.478.596,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.996,00	0,00	13.996,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	74.930.454,00	(6.011.301,00)	68.919.153,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.255.341,00	0,00	2.255.341,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.766.076,00	0,00	6.766.076,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Belanja Kerja ASN	610.575.000,00	(6,450,500.00)	604.124.500,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	163.998.000,00	0,00	163.998.000,00
Belanja Honorarium	81.600.000,00	0,00	81.600.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
TOTAL	2.342.063.255,00	(12,461,801.00)	2.329.601.454,00

Realisasi Beban Pegawai – LO sebesar Rp. 2.329.601.454,00 berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai – LRA sebesar Rp. 2.393.811.318,00. Terdapat Selisih sebesar (Rp.12.461.801,00) lebih besardi realisasibelanja pegawai. Hal ini terjadi karena adanya utang iuran BPJS bulan September s.d Nopember 2020 sebesar (Rp.6.011.301,00) yang dibayarkan di tahun 2021 dan selisih antara utang

pembayaran belanja tamsil pegawai 2020 yang dibayarkan di tahun 2021 dengan utang belanja tamsil pegawai 2021.

= Utang tamsil 2021 – utang tamsil 2020

= Rp.43.487.000,00 – Rp.49.937.500,00 = (Rp.6.450.500,00)

Penyesuaian = Utang belanja (tamsil 2021)+ utang belanja 2020 (iuran BPJS)

= (Rp.6.450.500,00) + (Rp.6.011.301,00)

= (Rp. 12.462.176,00)

b) Beban Barang dan Jasa = Rp.4.186.700.454,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah Rp.4.186.700.454,00berkurang(Rp.455.675.172,00) atau (9,82%) dari realisasi beban persediaan tahun 2020 sebesar Rp.4.642.375.626,00 secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun (%)	
Beban Barang Pakai Habis	2,137,452,513.00	2,807,446,377.00	(669,993,864.00)	(23.86)
Beban Jasa Kantor	1,337,529,014.00	1,355,152,804.00	(17,623,790.00)	(1.30)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	515,290.00	400,000.00	115,290.00	28.82
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	84,310,000.00	73,131,100.00	11,178,900.00	15.29
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82,865,550.00	9,545,500.00	73,320,050.00	768.11
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,956,500.00	750,000.00	182,206,500.00	24.294.20
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361,071,587.00	395,949,845.00	(34,878,258.00)	(8.81)
JUMLAH	4,186,700,454.00	4,642,375,626.00	(455,675,172.00)	(9.82)

Realisasi belanja barang dan jasa LRA tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.675.185.091,00 sedangkan realisasi beban persediaan-LO tahun 2021 sebesar Rp.4.186.700.454,00 secara rinci terdiri dari:

URAIAN	LRA	PENYESUAIAN	LO
Beban Barang Pakai Habis	1,625,937,150.00	511,515,363.00	2,137,452,513.00
Beban Jasa Kantor	1,337,529,014.00	0,00	1,337,529,014.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	515,290.00	0,00	515,290.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	84,310,000.00	0,00	84,310,000.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82,865,550.00	0,00	82,865,550.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,956,500.00	0,00	182,956,500.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	361,071,587.00	0,00	361,071,587.00
TOTAL	3,675,185,091.00	511,515,363.00	4,186,700,454.00

Nilai Beban Barang dan Jasa - LO sebesar Rp.4.186.700.454,00 berbeda dengan nilai realisasi Belanja Barang dan Jasa–LRA sebesar Rp.3.675.185.091,00. Terdapat selisih sebesar Rp.511.515.363,00.

Hal ini terjadi karena adanya selisih nilai persediaan tahun 2021(persediaan awal) sebesar Rp.517.571.613,00 dan nilai persediaan

tahun 2021 (persediaan akhir) sebesar Rp.6.056.250,00 sebesar Rp.511.515.363,00.

Secara perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LO} &= (\text{LRA}) + (\text{Persediaan Awal} - \text{Persediaan Akhir}) \\ &= 3.675.185.091 + (517.571.613 - 6.056.250) \\ &= 3.675.185.091 + 511.515.363 \\ &= 4.186.700.454 \end{aligned}$$

c) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin = Rp.386.307.547,00

Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.386.307.547,00 berkurang sebesar (Rp.90.842.550,00) atau (19,04%) dari realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp.477.150.097,00 secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	82,681,937.50	176,670,937.50	(93,989,000.00)	(53.20)
Beban Penyusutan Alat Ukur	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Alat Kantor	34,275,000.00	74,135,000.00	(39,860,000.00)	(53.77)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	49,720,910.00	56,604,510.00	(6,883,600.00)	(12.16)
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9,600,000.00	13,960,000.00	(4,360,000.00)	(31.23)
Beban Penyusutan Alat Studio	16,202,000.00	16,202,000.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	589,700.00	189,900.00	399,800.00	210.53
Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	368,750.00	368,750.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Komputer Unit	53,429,750.00	28,535,500.00	24,894,250.00	87.24
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	136,779,500.00	107,823,500.00	28,956,000.00	26.85
JUMLAH	386,307,547.50	477,150,097.50	(90,842,550.00)	(19.04)

d) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan = Rp.156.162.270,00

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.156.162.270,00 sama dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2020, secara rinci terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	152.162.270,00	152.162.270,00	0,00	0,00

JUMLAH	152.162.270,00	152.162.270,00	0,00	0,00
---------------	----------------	----------------	------	------

e) **Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi = Rp.1.088.036,38**

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga adalah sebesar Rp.1.088.036,38, bertambah Rp.0,01 atau 0,00% dibanding tahun 2020 sebesar Rp.1.088.036,38.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.088.036,38	1.088.036,37	0,01	0,00
JUMLAH	1.088.036,38	1.088.036,37	0,01	0,00

5.3.3 Kegiatan Non Operasional

- **Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya**

Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.496.533,33, sedangkan untuk tahun 2021 Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional tahun 2021 tidak ada atau nihil.

- **Surplus/ Defisit sebelum pos luar biasa**

Surplus/ Defisit sebelum pos luar biasa tahun 2021 sebesar (Rp.7.059.859.761,88), berkurang Rp.514.111.795,32 atau (6,79%) dibanding tahun 2020 sebesar (Rp.7.573.971.557,20)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	(7.059.859.761,88)	(7.573.971.557,20)	514.111.795,32	(6,79)
JUMLAH	(7.059.859.761,88)	(7.573.971.557,20)	514.111.795,32	(6,79)

5.3.4 Pos Luar Biasa

Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/ Defisit dari pos luar biasa tahun 2021 sebesar Rp. 0,00, sama dengan Surplus/ Defisit dari pos luar biasa tahun 2020.

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/ Defisit-LO tahun 2021 sebesar (Rp.7.059.859.761,88), berkurang Rp.514.111.795,32 atau (6,79%) dibanding tahun 2020 sebesar (Rp.7.573.971.557,20)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%

Surplus/Defisit-LO	(7.059.859.761,88)	(7.573.971.557,20)	514.111.795,32	(6,79)
JUMLAH	(7.059.859.761,88)	(7.573.971.557,20)	514.111.795,32	(6,79)

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.1 Ekuitas Awal = Rp.9.827.075.591,75

Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.827.075.591,75.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO = (Rp.7.059.859.761,88)

Surplus/ Defisit-LO tahun 2021 sebesar (Rp.7.059.859.761,88), berkurang (Rp.514.111.795,32) atau (6,79%) dibanding tahun 2020 sebesar (Rp.7.573.971.557,20)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
Surplus/Defisit-LO	(7.059.859.761,88)	(7.573.971.557,20)	(514.111.795,32)	(6,79)
JUMLAH	(7.059.859.761,88)	(7.573.971.557,20)	(514.111.795,32)	(6,79)

5.4.3 Kewajiban untuk dikonsolidasikan = Rp.6.453.847.346,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan R/K PPKD Tahun 2021 merupakan Realisasi Anggaran Belanja pada SKPD yang pada tahun 2021 sebesar Rp.6.453.847.346,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp.580.025.221,00) atau 8,25% dari Rp.7.033.872.567,00 ditahun 2020 menjadi Rp. 7.033.872.567,00 ditahun 2021.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	6.453.847.346,00	7.033.872.567,00	(580,025,221,00)	(8,25)
JUMLAH	6.453.847.346,00	7.033.872.567,00	(580,025,221,00)	(8,25)

5.4.4 Ekuitas Akhir = Rp.9.221.063.175,87

Ekuitas Akhir tahun 2021 sebesar Rp.9.221.063.175,87, berkurang (Rp.606.012.415,88) atau (6,17%) dibanding tahun 2020 sebesar Rp.9.827.075.591,75.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik/Turun	
			Rp.	%
EKUITAS AWAL	9,827,075,591.75	10,333,361,641.62	(506,286,049.87)	(4.90)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,059,859,761.88)	(7,573,971,557.20)	(514,111,795.32)	(6.79)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN				

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:				
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00	0.00	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00	0.00	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	0.00	33,812,940.33	(33,812,940.33)	100.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6,453,847,346.00	7,033,872,567.00	(580,025,221.00)	(8.25)
EKUITAS AKHIR	9,221,063,175.87	9,827,075,591.75	(606,012,415.88)	(6.17)

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga merupakan lembaga teknis daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diDinpendukcapil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga mulai melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 06 tahun 2010 tentang Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga menerapkan sistem pelayanan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan stake holder lainnya.

6.2 Struktur Organisasi dan Keadaan Pegawai

1. Struktur Organisasi

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - Kasi Identitas Penduduk;
 - Kasi Pindah Datang dan Pendaftaran Penduduk;
- d) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - Kasi Kelahiran dan Kematian;
 - Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 - Kasi Pengelolaan Adminitrasi Kependudukan;
 - Kasi Kerjasama dan Motivasi Pelayanan;

2. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai negeri sipi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga berjumlah 21 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai menurut jenis kelamin :
- Laki-laki : 9 orang
 - Perempuan : 8 orang
- b. Pegawai menurut Pendidikan :
- Pasca Sarjana (S2) : 1 orang
 - Sarjana (S1) : 9 orang
 - Diploma (D3) : 1 orang
 - SLTA : 5 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 1 orang
- c. Pegawai menurut Golongan/Ruang :
- Golongan IV : 2 orang
 - Golongan III : 12 orang
 - Golongan II : 2 orang
 - Golongan I : 1 orang
- d. Pegawai menurut status kepegawaian:
- Pegawai Negeri Sipil : 17 orang

6.3 Susunan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2021

- a. Pengguna Anggaran : Drs. M. Fathurrohman, M.Si
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : -
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :
- Suhartoto, S.Kom
 - Meta Pramantha, SE
 - Dwi Budi Pranowo, S.Sos
 - Wasri Purwati, S.Sos
- d. Bendahara Pengeluaran : Aris Budiarto, S.Kom.
- e. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Indah Susriatin, SE
- f. Pengurus Barang : Ana Novianto
- g. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : Linda Kusningsih
- h. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan : Haryanto
- i. Operator SIMDA : Mustikarini Wulandari
- j. Operator Simbadda/ Aset : Affan Budi S

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lancar. Target kinerja yang ditetapkan masing-masing kegiatan dapat tercapai secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 tersebut tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik dari semua pihak.

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang. Hambatan dan kendala yang ada harus segera dicari solusi penyelesaiannya agar kinerja yang telah tercapai dapat lebih ditingkatkan lagi.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan akan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021, dan dapat sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang akan ditempuh di tahun mendatang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan maksimal.

Purbalingga, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199303 1 005